

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR
MINYAK NON SUBSIDI TANPA IZIN OLEH HP BERDASARKAN
AJARAN KONKURSUS DITINJAU DARI KUHP DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

CHYNTIA BELLA YUDI ROSITA PUTRI

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui apakah HP dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran konkursus atas tindakan penyimpanan Bahan Bakar Minyak non subsidi tanpa izin ditinjau dari KUHP dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. perbuatan yang dilakukan oleh HP perihal penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan yang dilakukan oleh HP telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana. Perbuatan HP telah memenuhi keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, yaitu melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang. Perbuatan yang dilakukan oleh HP memenuhi kedua unsur Pasal 480 KUHP dan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, berdasarkan konkursus idealis sebagaimana Pasal 63 ayat (1) KUHP, maka perbuatan yang dilakukan HP dapat dijatuhkan hanya satu pidana pokok terberat. Sehingga HP dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyimpanan Tanpa Izin, Bahan Bakar Minyak

Abstract -The purpose of writing this scientific journal is as a requirement for graduation and obtaining a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law of the University of Surabaya. Practical Objectives of the writing of this thesis to be able to know whether HP can be subject to criminal liability based on concurrent teachings on the act of storing non-subsidized fuel oil without permission in terms of the Criminal Code and Law no. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas. acts by HP concerning the storage of fuel of pertamax type may be subject to criminal liability under Article 53 letter c of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Natural Gas. Actions committed by HP have fulfilled all elements of criminal liability. HP's deeds have fulfilled all elements as Article 53 letter c of Law no. 22 of 2001, namely the storage of fuel pertamax type without having a storage business license from the authorities. The acts committed by HP fulfill both the elements of Article 480 of the Criminal Code and Article 53 letter c of Law no. 22 of 2001, pursuant to the idealist concurrency as Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code, HP's deeds may be imposed only one heaviest principal. So that HP can be subject to criminal sanction as Article 53 letter c Law no. 22 of 2001 and may be subject to 3 (three) years imprisonment and a maximum fine of Rp 30,000,000,000.00 (thirty billion rupiahs).

Keywords: Criminal Accountability, Unlicensed Storage, Fuel Oil

